PENERAPAN KECERDASAN ORGANISASI DALAM SEKTOR PUBLIK: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kecamatan Mauk

Safira Ayu Dewi Masita¹, Nimas Elka Pratiwi², Najwa Ardelia Rahmawati³, Wessy Ghevira⁴, Jidan Rizkian⁵, Irvan Arif Kurniawan⁶

2201010055@students.unis.ac.id¹, 22010028@students.unis.ac.id²,
22010031@students.unis.ac.id³, 22010041@students.unis.ac.id⁴,
22010038@students.unis.ac.id⁵

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan kecerdasan organisasi dalam sektor publik, dengan fokus pada Pemerintah Daerah Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dalam konteks era digital yang semakin berkembang, transformasi digital menjadi suatu keharusan bagi sektor publik untuk tetap relevan dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecerdasan organisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi guna meningkatkan kinerja, efektivitas operasional, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan kecerdasan organisasi di tingkat pemerintah daerah menjadi semakin penting, mengingat kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kecerdasan organisasi dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di Kecamatan Mauk, serta peran teknologi informasi dan sistem manajemen pengetahuan dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, dokumen ini juga membahas tantangan yang dihadapi, seperti masalah jaringan internet yang terbatas, yang dapat menghambat implementasi teknologi secara optimal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan kepemimpinan dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung pengembangan kecerdasan organisasi.

Kata Kunci : Kecerdasan Organisasi, Sektor Publik, Kecamatan Mauk.

Abstract

This study examines the application of organizational intelligence in the public sector, focusing on the Mauk District Government, Tangerang Regency. In the context of the increasingly developing digital era, digital transformation has become a necessity for the public sector to remain relevant and efficient in providing services to the community. Organizational intelligence is defined as the ability of an organization to collect, analyze, and utilize information to improve performance, operational effectiveness, and interaction between government and society. The application of organizational intelligence at the local government level is becoming increasingly important, given the complexity of the ever-growing needs of society. This study aims to explore how organizational intelligence can improve the quality of government performance in Mauk District, as well as the role of information technology and knowledge management systems in supporting data-based decision making. In addition, this document also discusses the challenges faced, such as limited internet network problems, which can hinder the optimal implementation of technology. With a qualitative descriptive approach, this study provides insight into the importance of human resource management and leadership in creating a work culture that supports the development of organizational intelligence.

Keywords: Organizational Intelligence, Public Sector, Mauk District.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan transformasi digital, sektor publik menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi informasi, perubahan sosial, serta meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut organisasi di sektor publik untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah kecerdasan organisasi (*organizational intelligence*), yang merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam memahami, menginterpretasikan, serta merespons informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis (Kusuma, 2023).

Kecerdasan organisasi dalam sektor publik mencakup berbagai aspek, termasuk *sense-making* (pemahaman informasi), *knowledge creation* (penciptaan pengetahuan), *decision-making* (pengambilan keputusan), serta kolaborasi antar pemangku kepentingan (Choo, 1998). Dengan menerapkan kecerdasan organisasi, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi untuk menyusun kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), memperbaiki sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan efisiensi operasional dalam pelayanan publik (Mariyam, dkk., 2024).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan kecerdasan organisasi di sektor publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Sudaryanto & Hanny, 2023). Di tingkat pemerintahan daerah, misalnya, kecerdasan organisasi memungkinkan pejabat publik untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data kependudukan, perencanaan pembangunan, serta pemantauan kinerja birokrasi secara *real-time* (Wardhana & Prasetyawan, 2017).

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan kecerdasan organisasi di sektor publik juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola informasi, serta resistensi terhadap perubahan dalam budaya organisasi pemerintahan (Bappeda, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis teknologi, penguatan sistem manajemen pengetahuan, serta optimalisasi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Dengan memahami konsep kecerdasan organisasi serta strategi implementasinya, sektor publik dapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan kecerdasan organisasi dalam sektor publik menjadi sangat relevan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif.

Penerapan kecerdasan organisasi di tingkat pemerintah daerah menjadi semakin penting, mengingat tuntutan untuk menyelaraskan kebijakan dan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Di tingkat pemerintah daerah, seperti Kecamatan Mauk yang terletak di bawah Kabupaten Tangerang. Penerapan kecerdasan organisasi memungkinkan sektor publik untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, baik itu perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, maupun perubahan sosial-ekonomi. Salah satu aspek penting dari kecerdasan organisasi adalah pengelolaan pengetahuan, yang memungkinkan instansi pemerintah untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data serta informasi yang relevan. Kecerdasan

organisasi mendorong kolaborasi yang lebih baik antar unit organisasi dan antar instansi pemerintah, yang pada gilirannya menghasilkan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan lebih efektif (Mokobombang, 2023).

Selain itu, teknologi informasi dan sistem manajemen pengetahuan yang baik dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan (Alma, B. 2020). Namun, meskipun kemajuan teknologi sudah banyak ditemukan, masalah jaringan internet yang terbatas atau tidak stabil masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Termasuk di Kecamatan Mauk ini masih mengalami masalah dengan kecepatan internet yang rendah, sering terputusnya koneksi, atau bahkan tidak adanya akses internet sama sekali.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kecerdasan organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di Kecamatan Mauk. Penelitian ini akan fokus pada beberapa aspek, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung pengembangan kecerdasan organisasi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "PENERAPAN KECERDASAN ORGANISASI DALAM SEKTOR PUBLIK" Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kecamatan Mauk.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan penerapan kecerdasan organisasi dalam sektor publik di Kecamatan Mauk Tangerang.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada kantor kecamatan Mauk yang beralamat Jl. Raya Otto Iskandardinata No. 6-7 Kelurahan Mauk Timur Kec. Mauk Kab. Tangerang - Banten 15531. Alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian di kantor kecamatan Mauk adalah salah satu sektor publik pemerintahan daerah. Oleh karena itu, memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Sumber Data

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara kepada staf pemberdayaan masyarakat pengurus utama Kecamatan Mauk Tangerang,

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi:

1. Wawancara: wawancara dilakukan dengan para pengurus utama staf pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mauk Tangerang, Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait pengalaman mereka tentang penerapan kecerdasan organisasi pada sektor publik kecamatan Mauk.
2. Observasi: Observasi dilakukan oleh peneliti langsung terhadap berjalannya proses penerapan kecerdasan organisasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam sehari-hari.

3. Dokumentasi: Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berbentuk peraturan, arsip, karya-karya monumental, film, gambar (foto), dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Mauk merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan ini dikenal dengan potensi alamnya yang didominasi oleh sektor pertanian, serta berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Sebagai bagian dari Kabupaten Tangerang, Mauk memiliki akses yang cukup baik ke berbagai infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, seperti jalan raya, serta kedekatannya dengan kawasan industri dan pusat kota Jakarta. Secara geografis, Kecamatan Mauk berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Tangerang, seperti Kecamatan Sepatan di sebelah timur dan Kecamatan Kosambi di sebelah barat. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 80,58 km² dengan jumlah penduduk yang terus berkembang. Wilayah ini memiliki potensi kelautan dan pertanian yang melimpah, terutama padi, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya. (Dwiyanto,2019)

Pada masa kepemimpinan Camat Mauk saat ini, visi dan misi yang diusung bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan pembangunan daerah.

Berikut adalah visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pemerintahan Kecamatan Mauk. Visi

“Menjadi Kecamatan yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan Keberlanjutan Lingkungan.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur administrasi, inovasi dalam layanan, dan penggunaan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan dan akses permodalan.
3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Melaksanakan program-program penghijauan, pengelolaan sampah, serta penyuluhan terkait dengan pentingnya menjaga keberlanjutan alam.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Sense-Making (Pemahaman Informasi)

Kemampuan organisasi untuk memahami lingkungan eksternal dan internal dengan cara mengumpulkan dan menafsirkan informasi. Seperti mengidentifikasi tren, peluang, dan ancaman. Sistem untuk memproses dan menganalisis data juga harus tersedia dengan tingkat pemahaman terhadap perubahan sosial ataupun politik. Dalam konteks pengembangan organisasi pemerintahan, Kecamatan Mauk di Tangerang memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya melalui pendekatan komprehensif berbasis kecerdasan organisasi. Sense-Making (Pemahaman Informasi), (Kurniawan,2021). menjadi fondasi awal dalam proses transformasi ini, di

mana pemerintah kecamatan perlu mengembangkan kemampuan sistematis untuk menginterpretasi dan menganalisis informasi kompleks dari lingkungan internal dan eksternal. Proses ini melibatkan pengumpulan data secara berkelanjutan dari berbagai sumber, termasuk laporan kelurahan, survei masyarakat, dokumentasi pembangunan, dan input langsung dari warga, yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi bermakna untuk mendukung perencanaan strategis.

Sense-Making berasumsi bahwa semua aspek berada dalam waktu dan ruang. Oleh karena itu, terdapat universalitas pembuatan makna yang dapat memungkinkan prediksi yang lebih sukses dan penjelasan yang lebih rinci daripada yang mungkin dilakukan dalam positivisme tradisional pendekatan. Mengacu pada Chun Wei Choo 1998, Sense-Making berasumsi bahwa kunci untuk mengidentifikasi universalitas ini terletak pada fokus pada mandat manusia untuk bergerak melalui ruang dan waktu. Sebaliknya, pencarian dan penggunaan informasi dianggap sebagai kegiatan "membangun" akal sehat. Diasumsikan bahwa semua informasi hanyalah pengertian yang dibuat oleh Individu pada saat-saat tertentu dalam ruang dan waktu. Dengan demikian, Sense-Making mencari pola dalam cara orang membangun pengertian daripada hubungan masukan-keluaran yang mekanistik. Sense-Making mengamati daripada mengasumsikan hubungan antara situasi dan kebutuhan informasi, antara informasi yang terpapar dan kegunaannya (Dervin, 1983).

Kecamatan Mauk, Tangerang, menerapkan Sense-Making untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial. Melalui informasi berupa survei, laporan kelurahan dan data statistik, pemerintah kecamatan mengidentifikasi kebutuhan, potensi dan permasalahan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan (Setiono, 2020). Hasilnya, kualitas pelayanan publik meningkat, partisipasi masyarakat meningkat, ekonomi lokal berkembang, infrastruktur membaik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Knowledge Creation (Penciptaan Pengetahuan)

Kemampuan organisasi untuk menciptakan pengetahuan baru dari pembelajaran dan inovasi, serta mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam proses organisasi. Hal ini ditandai dengan Kemampuan menggabungkan pengetahuan tacit (tidak terucap) dengan pengetahuan eksplisit (terstruktur). Adanya sistem manajemen pengetahuan untuk berbagai informasi dan inovasi. Selanjutnya menjadi tahapan krusial di mana Kecamatan Mauk dapat mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan yang efektif antara pegawai dan lintas unit kerja. Hal ini dapat direalisasikan melalui pembentukan platform digital untuk dokumentasi dan pertukaran informasi, penyelenggaraan program pelatihan berkala, serta mendorong budaya inovasi dan learning organization. Melalui pendekatan ini, setiap individu dalam organisasi tidak hanya sekadar penerima informasi, melainkan juga kontributor aktif dalam penciptaan pengetahuan baru yang dapat mendukung pengembangan wilayah.

Knowledge creation atau penciptaan pengetahuan di Kantor Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, berkaitan dengan bagaimana pegawai pemerintah daerah menciptakan dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya (Wardhana & Prasetyawan, 2017). Knowledge creation di Kantor Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang merupakan proses yang krusial dalam meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan website terpadu yang diadakan bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola informasi dan komunikasi secara efektif. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik (Santoso, 2017).

Selain itu, penciptaan pengetahuan juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan serta solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Kegiatan pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan merayakan dan upacara peringatan hari jadi kecamatan Mauk menunjukkan upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui interaksi ini, terjadi pertukaran pengetahuan yang dapat memberikan kritik/solusi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat, Kantor Kecamatan Mauk dapat menciptakan inovasi yang lebih relevan dan berkelanjutan (Setiawan, 2020).

Decision-Making (Pengambilan Keputusan)

Kemampuan organisasi untuk menggunakan informasi dan pengetahuan secara efektif untuk mengambil keputusan strategis dan operasional (Kusuma, H., 2023). Data yang tersedia pun harus relevan dan akurat sehingga dapat sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dan ketepatan dalam merespon keluhan atau perubahan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan proses krusial dalam manajemen organisasi, termasuk di sektor publik. Dalam konteks penerapan kecerdasan organisasi di Pemerintah Daerah Kecamatan Mauk, pengambilan keputusan yang efektif menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan dan program. Kecerdasan organisasi mencakup kemampuan kolektif suatu organisasi dalam memahami, menginterpretasikan, dan menanggapi informasi secara efektif. Hal ini melibatkan integrasi antara kecerdasan emosional pemimpin, komunikasi organisasi, dan pemanfaatan informasi teknologi. Menurut Mariyam dkk. (2024), kecerdasan emosional pemimpin berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, waktu komunikasi yang lebih baik, dan adaptasi terhadap perubahan (Mariyam, 2024).

Proses pengambilan keputusan di kecamatan Mauk juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum penting yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan prinsip partisipasi masyarakat yang diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah juga memberikan panduan terkait proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak stakeholder di tingkat pemerintahan lokal (Soewarno, 2019).

Kecamatan Mauk dapat mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan yang lebih canggih, partisipatif, dan berbasis bukti. Pendekatan ini mensyaratkan penggunaan teknologi informasi mutakhir, analisis data yang komprehensif, serta keterlibatan multipihak dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program. Dengan mengintegrasikan data empiris, perspektif stakeholder, dan kerangka strategis yang jelas, kecamatan dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.

Kolaborasi Berbagai Stakeholder

Menurut Rahmawati, N., dkk (2021), kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, dapat mempercepat inovasi dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal. Di Kecamatan Mauk, kerjasama dengan universitas dalam

bentuk program pengabdian masyarakat dan penelitian terapan telah membantu memperkenalkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan solusi praktis bagi masyarakat, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah Kecamatan dengan masyarakat di Mauk dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. (Setiawan, A., et al, 2022). Pemerintah Kecamatan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menentukan prioritas program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih spesifik dan relevan mengenai isu-isu yang mereka hadapi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Keberhasilan program-program sosial atau pembangunan di Kecamatan Mauk, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi yang efektif dengan masyarakat bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, seperti kolaborasi dengan masyarakat nelayan di pesisir Pantai.

Kolaborasi antara pemerintah Kecamatan dengan masyarakat di Mauk dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. (Setiawan, A., et al, 2022). Pemerintah Kecamatan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menentukan prioritas program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih spesifik dan relevan mengenai isu-isu yang mereka hadapi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Keberhasilan program-program sosial atau pembangunan di Kecamatan Mauk, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi yang efektif dengan masyarakat bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, seperti kolaborasi dengan masyarakat nelayan di pesisir Pantai.

Tantangan Penggunaan Kecerdasan Organisasi

Tantangan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang masih belum optimal dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi. Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki keterampilan atau literasi digital yang memadai mungkin kesulitan dalam menggunakan platform online atau aplikasi pemerintah. Hal ini menghambat kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan layanan publik yang melibatkan teknologi.

Mengatasi tantangan utama dalam penerapan kecerdasan organisasi Pemerintah Kecamatan Mauk telah menyiapkan solusi yang sudah diterapkan. Dalam permasalahan perangkat, pihak Kecamatan Mauk harus mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku di organisasi pemerintahan. Pengajuan kebutuhan perangkat baru harus melalui proses pengusulan anggaran yang sudah terjadwal. Jika terdapat kendala dalam perangkat di tahun sebelumnya, pengajuan anggaran baru hanya bisa dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, untuk mengatasi tantangan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Kecamatan Mauk secara rutin melakukan pergantian dan pembaruan personil melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Bappeda, 2023). Hal ini dilakukan setiap tahun untuk memastikan adanya peningkatan kualitas SDM dalam mengoperasikan teknologi dan menjalankan sistem organisasi.

KESIMPULAN

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertanian dan kelautan. Melalui pendekatan Sense-Making, Kecamatan Mauk memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Penciptaan pengetahuan (Knowledge Creation) diterapkan melalui pelatihan pegawai dan kolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan inovasi layanan publik. Dalam pengambilan keputusan (Decision-Making), Kecamatan Mauk memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan kebijakan yang lebih akurat dan partisipatif. Kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah ini. Namun, tantangan utama dalam penerapan kecerdasan organisasi mencakup keterbatasan SDM dan teknologi, yang diatasi melalui pelatihan rutin dan pembaruan sistem. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Kecamatan Mauk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia dan Widiartanto. Pengaruh Implementasi Knowledge Management Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada UMKM Industri Kreatif Digital di Kota Semarang). Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang. (2023). "Dokumen Strategi Transformasi Digital Pemerintahan Kecamatan".
- Brenda Dervin, Ph.D, TINJAUAN UMUM PENELITIAN YANG MEMBUAT MAKNA: KONSEP, METODE, DAN HASIL YANG TERJADI SAMPAI SAAT INI, Universitas Negeri Ohio, Columbus, Ohio 43220.
- BPK RI. Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014.
- BPK RI. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004.
- Choo, C. W. (1998). *The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions*. New York: Oxford University Press.
- Devit Setiono, Penerapan Model Choo Sense Making Untuk Meningkatkan Sharing Knowledge Pada Laboratorium Media Komunikasi, *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, Universitas Budi Luhur, Vol.4, No.4, Oktober 2020, Page 1079-1085.
- Hamdani, M. G. Q. (2023). Kajian Sistem E-Commerce Marketplace pada Website Jakmall.com. *UNIKOM Library Respository*, Chapter 2, 1-15.
- Kurniawan, H. (2021). "Strategi Knowledge Creation di Tingkat Kecamatan". Pusat Studi Pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cabang Banten.
- Kusuma, H. (2023). *Organizational Intelligence in Public Sector: Enhancing Decision Making and Policy Effectiveness*. Jakarta: Pustaka Pemerintahan.
- Mahatmyo, A. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 1-124.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mariyam, A. (2024). Pengaruh Kecerdasan Emosional Pemimpin terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan dalam Organisasi: Tinjauan Literatur pada Perusahaan Manufaktur. 2(2), 182–190.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat, 1, 1-40.
- Rahmawati, N., dkk. (2021). Kolaborasi lintas sektor untuk inovasi dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi Daerah*, 5(2), 123–135.

- Santoso, E. (2017). Pengelolaan Pengetahuan di Pemerintahan Lokal: Penerapan dan Tantangannya. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 23(2).
- Santoso, J. T. (2023). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). YPAT STEKOM: Semarang.
- Setiawan, M. (2020). Kebijakan Publik dan Inovasi Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soewarno, S. (2019). Manajemen Keputusan di Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit Pemerintah Indonesia.
- Wardhana, R. A. P., & Prasetyawan, Y. Y. (2017). Analisis Knowledge Creation Pengelola Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(1), 391–400.
- Wahyudi Mokobombang, dkk. (2023). Dampak Perubahan Layanan Publik Yang Disebabkan Oleh Teknologi Dan Media Sosial. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2023, P-ISSN: 2746-6906, E-ISSN: 2746-6914.
- Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimus (Volume 1, 2018)* eISSN: 2654-3257 p-ISSN: 2654-3168.